

BAB II

KOTA MALANG DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA

A. Letak Geografis Kota

Berkembangnya sebuah wilayah menjadi pusat kota juga pusat pemerintahan dan pemukiman tidak pernah lepas dari faktor geografi dan topografinya. Wilayah pedalaman namun memiliki akses perdagangan dan jalur komunikasi yang baik akan lebih mendukung perkembangan wilayah menjadi sebuah kota dengan karakteristik yang kuat. Malang misalnya, kota pemukiman pada masa kolonial ini memang memiliki sebuah kondisi dimana geografi wilayahnya sangat baik bagi pemukiman penduduk terutama bangsa-bangsa Asing yang telah terbiasa dengan kondisi udara rendah dan sejuk. Pada awal pertumbuhannya, kota ini merupakan sebuah wilayah kecil terletak di sebelah Selatan Pasuruan yang pada masa abad ke-18 terkenal dengan jalur perdagangannya. Daerah Malang diketahui berpenduduk hanya ada di pusat, sekitar alun-alun kota dengan jalan kearah Utara menuju Pasuruan.¹

Batas kota Malang berdasarkan *Gemeentebld 1937 no. 108* adalah, batas kota sebelah Utara terdapat di desa Jatimulya, Mojo-Langu, Tunjung Sekar, dan Polowijen, di Selatan desa-desa tersebut dibatasi sungai yang bernama kali Mewah. Batas Timur kota Malang ada di sepanjang kali Mewah yang mengalir

¹A. Van Schaik, *Malang Beeld Van een Stad*, (Pumerend: Asia Major, 1996), hlm. 17.

kearah Barat hingga mencapai tepi kali Santun. Ada desa Buring yang berjarak 600 meter sampai daerah irigasi Kedung Kandang, kampung Wonorejo, dan desa Wonokojo. Batas sebelah Selatan kota berada di desa Bumiayu sampai kali Brantas, kemudian sepanjang kali sebagai batas Selatan terhubung antara desa Kebon Sari dengan kali Metro; ada desa Arjosari, Pandanlandung dan desa Mulyorejo di sebelah Timur Laut, wilayah yang menjadi batas Selatan kota Malang. Dan yang menjadi batas kota sebelah Barat berawal dari desa Mulyorejo, desa ini memanjang ke Utara sampai kali Po yang mengalir hingga mencapai sungai Brantas.² Kota Malang berbatasan langsung dengan kabupaten Pasuruan di sebelah Utara, hingga titik temu antara sungai Amprung dengan Sungai Bango. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan hulu sungai Bango yang bersambung dengan bagian Utara kabupaten Lumajang.³

Dan pusat kota berada di sekitar Alun-alun lama, yaitu persimpangan antara *Kayoetangstraat* (jalan Kayutangan) di sebelah Utara, *Klodjenstraat* (jalan Klojen) dari Timur, dari Selatan ada Jagalan melewati Pecinan dan dari arah Barat bermula di kawasan Talun.⁴ Perluasan wilayah di kota ini benar-benar sangat pesat, salah satu bukti adalah pada tahun 1914 banyak sekali ditemukan bangunan-bangunan sepanjang jalan utama kearah Lawang yang bersuasana pedesaan. Di sebelah Utara Lowok waru terdapat bangunan Penjara pusat milik

²*Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 40-41.

³*Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1905 No. 278.

⁴ Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang* (Yogyakarta: ANDI, 1996), hlm., 19 dan lihat peta *Gemeente Malang* tahun 1914 yang menggambarkan luas wilayah. Wilayah ini berbeda jauh dengan peta wilayah pada tahun 1934 pada gambar 2.



pemerintah kota. Rute jalan antara Oro-oro Dowo sampai Betek, masing-masing tidak cukup jauh dari hulu sungai Brantas terdapat bangunan-bangunan rumah dan sebuah pabrik Es. Kompleks militer terdapat di Rampal, ada lapangan yang biasa digunakan untuk latihan, dan sebuah rumah atau gudang mesiu, gelanggang balapan dan kolam renang untuk prajurit. Daerah antara Rampal sampai Claket masih berupa hamparan sawah, kecuali lahan yang dibangun rumah sakit militer.⁵ Sungai Brantas yang tepat membelah kota menambah indah suasana. Pemandangan ini kemudian dimanfaatkan oleh J.J. Coert, seorang Asisten Residen kedua Malang untuk menata ulang kota dengan menempatkan aliran sungai Brantas mengalir ditengah-tengahnya.



Gambar 1. Wilayah Malang tahun 1914 dengan luas 1503 Ha

Sumber: *Malang Beeld Van Een Stad*

⁵ A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm. 32



Gambar 2. Wilayah Malang tahun 1934 dengan luas 1.882 Ha.

Sumber: *Malang Beeld Van Een Stad*

Lambat laun perkembangan wilayah dengan semakin pesat jumlah penduduk, baik dari dalam maupun para migran menempati wilayah-wilayah dalam kota. Tahun 1934 luas kota Malang menjadi 1882 Ha yang sebelumnya hanya sebesar 1503 Ha.⁶ Pemerintah kota senantiasa mengusahakan perluasan wilayah kekuasaannya semaksimal mungkin. Sampai dengan tahun 1938 wilayah penguasaan kotapraja Malang masih sama dengan luas pada tahun 1934, artinya belum diketahui adanya penambahan luas wilayah. Namun pada pertengahan tahun 1938, tepatnya tanggal 27 Juli 1938 dewan kota mengadakan rapat

⁶ Lihat Gambar 1. Pada gambar nomor 1 wilayah arsir sebagai tanda bahwa lokasi tersebut sudah berpenghuni terlihat masih berada dipusat (bagian tengah), sedangkan pada gambar nomor 2 wilayah arsir mulai berpecah menjauh dari bagian pusat.

membahas kemungkinan penambahan batas kota Malang.⁷ Rencana penambahan wilayah kota, tentu saja dengan mengambil sebagian dari wilayah penguasaan *Regentschap*. Permasalahan hak wilayah tersebut sering kali terbentur oleh faktor-faktor ekstern dan intern yang berada didalamnya. Salah satu contoh dari faktor ekstern adalah masalah penduduk atau masyarakat yang menjadi penghuni dari wilayah sengketa. Rasanya tidak mudah menyakinkan status penduduk atas segala perubahan kebijakan dari wilayah *regentschap* ke wilayah *Stadsgemeente*. Sedangkan faktor intern tetap berkuat disektor pemerintahnya.⁸ Perebutan wilayah seperti ini tidak seharusnya terjadi apabila pemerintah provinsi cepat menanggapi kebutuhan lahan didaerah untuk berkembang. Oleh karena pemerintah provinsi-lah yang paling berwenang menentukan perihal perluasan-perluasan semacam ini. Kotapraja Malang memerlukan penambahan lahan atas wilayah kekuasaannya tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan pemukiman melainkan juga wilayah pertanian, perkebunan, industri, tanah kosong dan sebagainya.

Keinginan Belanda untuk membentuk citra kota kolonial pada kota-kota di Indonesia sangat dominan mempengaruhi pola tata letak kota Malang. Wilayah

⁷*Provinciaal Blad Van Oost Java 1939*, Nummer 11- Gebiedsuitbreiding van de Stadsgemeente Malang, Bijlage IV b (No. 37/1938), hlm. 402-406.

⁸ Dalam notulen rapat dewan yang diselenggarakan pada 27 Juli 1938, seorang anggota dewan bernama Raden Mas Sama'oen menyatakan rasa keberatan atas keinginan pemerintah kotapraja melebarkan wilayahnya. Keberatan tersebut dipaparkan beserta analisa-analisa yang diyakini membawa dampak negatif tersendiri bagi tiga komponen, yaitu wilayah sengketa; penduduk; dan pemerintahan asal wilayah yang disengketakan. Lihat *ibid.* Sampai akhir tahun 1939 belum diketahui adanya perluasan wilayah di kota Malang sebagai reaksi dari rapat dewan seperti yang tersebut diatas.

yang berada diketinggian 1556 kaki diatas permukaan air laut dan memiliki suhu dikisaran 24,5° celcius menjadikan kota ini sebagai *Switzerland of Indonesia*.⁹

Kota Malang merupakan sebuah kota bertipologi sebagai kota kuno. Kota yang berada di wilayah dataran tinggi antara gunung Semeru dan gunung Kawi ini dalam konteksnya tidak berarti wilayah dengan latar belakang punggung gunung melainkan kawasan yang berada di tepi aliran sungai Brantas.¹⁰ Walaupun pada kenyataannya kondisi geografis wilayah ini berada di antara gunung-gunung yang menciptakan keindahan tersendiri bagi wilayah pemukiman. Beberapa puncak gunung berapi itu antara lain, gunung Arjuna dan Anjasmoro di bagian Utara, gunung Semeru dan gunung Bromo di sebelah Timur serta gunung Kelud di Barat, gunung Kawi dan perbukitan kapur di bagian Selatan.¹¹ Lembah sungai Brantas yang melingkar mengelilingi pegunungan api besar dan terbentuk oleh gunung Welirang dan gunung Arjuno (3.339 meter), Kelud dan Kawi (2.651 meter) ini bermuara didua tempat, yaitu Surabaya dan Bangil. Bagian hulu sungai

⁹ Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Lima Puluh Lima Tahun Kota Malang: Buku Petunjuk* (Malang: Dewan Pemerintahan Daerah, 1954), hlm. 21.

¹⁰ A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm. 7. Sungai Brantas yang mengalir dari arah utara ke selatan ini sangat berpengaruh pada bentuk kota Malang. Sungai ini melewati kota dan berfungsi batas kota juga mendukung peran transportasi perdagangan di kota. Lihat Handinoto, "Studi Tentang kota Malang. Sebuah Kota yang Dirancang dengan Baik Pada Masa Kolonial (1914-1940)" (sebuah makalah penelitian tidak diterbitkan), (Surabaya: Fakultas Teknik Arsitektur -Universitas Kristen Petra, 1998), hlm., 6. Lihat M. Habib Mustopo, ed.all., *Hari Jadi Kabupaten Blitar, 5 Agustus 1324* (....., 1970), hlm., 8-9 Malang berada di wilayah dataran tinggi yang tergolong *alluvial* dan bersifat masam hingga larutan basa asam menimbulkan unsur garam yang tidak bisa dipisahkan dari kesuburan tanah sebagai akibat endapan *alluvial* masih berkaitan erat dengan aliran sungai Brantas yang mengalir tepat di tengah kota Malang.

¹¹ *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*, Tweede Deel H-M ('S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1918), hlm., 649. Lihat juga *Staatsblad* 1914 no. 514 tentang batas-batas kota Malang dan Desentralisasi yang ditetapkan pemerintah kolonial.

Brantas inilah tempat kekuasaan terbesar bagi kejayaan Jawa masa lampau.¹² Latar belakang seperti itulah kemudian Malang menjadi sebuah kota pemukiman yang tertata dengan baik oleh banyak pihak-pihak swasta yang ikut berpartisipasi dalam pembangunannya.¹³ Pembangunan yang telah dilakukan di kota Malang sampai tahun 1935 sebesar 67% dari total luas tanah milik pemerintah kota.¹⁴

B. Perkembangan Awal Kota Malang

Secara geografis, lahirnya kota-kota di Indonesia pada dasarnya merupakan perkembangan dari wilayah pesisir yang identik dengan sistem perniagaan dan pertanian di wilayah pedalaman. Suatu wilayah menjadi kawasan kota, merupakan sebuah bentuk perpanjangan dari pusat kekuasaan atau pemerintahan. Berawal dari sebuah pusat kekuasaan dengan lingkungan yang tertata dengan struktur kosmologi dan tak luput dari sistem kepercayaan masyarakatnya kota-kota pedalaman di Indonesia tumbuh dan berkembang. Di daerah pedalaman dimana pengaruh Hindu masih sangat kental, pemukiman tumbuh mengitari pusat-pusat kekuasaan. Fungsi kota-kota itu adalah memberikan berbagai macam barang dan jasa untuk kelangsungan kehidupan masyarakat

¹² Malang adalah satu dari tiga daerah hulu sungai Brantas yang berkembang sebagai pusat pemerintahan. Dalam hal ini adalah pemerintahan kerajaan Singosari. Dennys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya*, jilid 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm., 34.

¹³ Martines Hoffman seorang pramuniaga berkebangsaan Belanda yang banyak berjasa atas pembangunan wilayah pemukiman Belanda di sebelah barat sungai Brantas. Lihat Suwardono dan Supiyati Rosmiayah, *Monografi Sejarah Kota Malang* (Malang: Sigma Media, 1997), hlm.18.

¹⁴ *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 40.

keraton, sementara kota-kota itu juga menikmati kemegahan yang melimpah dari istana kerajaan serta keamanan yang secara otomatis terjamin.¹⁵

Kota Malang sebagai pusat pemerintahan jaman *oriental* telah diketahui melalui transkrip-transkrip yang ditemukan disekitar kota Malang.¹⁶ Pusat kerajaan sudah ada pada tahun 1400, tepatnya berada di tikungan aliran sungai Brantas yang dikenal sebagai wilayah *Koetobedah*.¹⁷ Penemuan piagam Dinoyo dapat dikatakan sebagai pembuka jalan bagi pengetahuan kita tentang aktivitas masyarakat dan raja Gajayana di kerajaan Kanjuruhan. Bukti otentik ini berkaitan dengan cikal bakal wilayah Malang yang saat ini terus berkembang. Menurut para ahli, kata-kata dalam transkrip-transkrip kuno yang telah diterjemahkan dan diyakini adalah nama-nama tempat atau suatu bangunan tertentu. Berbagai penafsiran dilakukan dan ternyata nama-nama tersebut sebagian besar masih dapat dilacak dan ditemukan di kota Malang dan sekitarnya walau tidak semua sama persis sebagaimana tercantum dalam piagam-piagam tersebut.¹⁸

¹⁵W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm., 133. Kota-kota di daerah pedalaman merupakan pusat-pusat administratif, sehingga dari kota-kota ini raja mengatur wilayah yang ada di sekitarnya.

¹⁶*Oriental*, mengutip istilah yang digunakan oleh Wertheim, *Ibid*, hlm, 36 yang mengarahkan pandangan pada masa-masa klasik pemerintahan Indonesia. Transkrip pertama yang menunjukkan sebuah komunitas di daerah Malang adalah dari piagam Dinoyo yang berangka tahun 760 M, berbahasa sanskerta. Dalam piagam Dinoyo disebut sejumlah nama bangunan atau wilayah yang diyakini merupakan candi dengan beberapa bekas tempat pemukiman. Lihat Suwardono dan Supiyati Rosmiayah, *op., cit*, hlm., 8.

¹⁷ Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur...op., cit.*, hlm., 15. Kekuasaan oriental yang pernah menghidupkan wilayah kota Malang dan yang menjadi cikal bakal penghuni kota adalah kekuasaan kerajaan Kanjuruhan (abad ke-8) dan Singosari (abad ke-12 M) yang terletak didaerah Malang selatan.

¹⁸ Misalnya nama Kanjuruhan (nama kerajaan raja Gajayana) adalah nama sebuah jalan, yaitu jalan Kanjuruhan, dukuh Watu Gong kelurahan Tlogomas. Dalam Piagam Balingawan berisi tentang pembebasan pajak atas desa Balingawang (mungkin sekarang bernama Mangliawan,

Kekuasaan besar yang berada di daerah Malang ini berangsur-angsur mulai surut. Mundurnya kerajaan Singosari akibat serangan dari pasukan raja Kediri tahun 1216 çaka mengakibatkan hancurnya periode kekuasaan kuno sebagai ibukota Malang.¹⁹ Tidak lama sejak keruntuhannya, seorang keturunan Rajasa bernama Wijaya dari Singosari mulai mengambil kekuasaan dan memulai jaman keemasannya setelah mengalahkan Jayakatwang, raja Kediri.²⁰ Pada jaman kerajaan Majapahit ini, Malang masih sempat disebut-sebut dalam kitab Negarakertagama. Wilayah ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.²¹

Pada masa kerajaan Mataram Islam ketika Sultan Agung menguasai kembali daerah bagian Timur pulau Jawa, Malang kemudian juga menjadi daerah yang tak terpisahkan dari berbagai pertempuran penguasaan wilayah oleh sultan

daerah dekat Wendit) dan nama desa itu sekarang berada di wilayah kabupaten Malang. Pejabat yang mengeluarkan perintah dalam piagam tersebut adalah *Rakryan Kanuruhan*. Jabatan *Kanuruhan* di duga berasal dari kerajaan Kanjuruhan yang pusatnya di sekitar kota Malang sekarang, jabatan tersebut masih digunakan dalam hierarki pemerintahan Mpu Sindok sampai jaman Majapahit. Lihat Suwardono dan Supiyati Rosmiayah, *loc.cit.*, hlm. 8-14

¹⁹Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm., 418.

²⁰Masa itu terjadi pada tahun 1215 çaka. Sebenarnya pengambilan kekuasaan lewat pertempuran tidak dilakukan oleh Wijaya dan pasukannya melainkan oleh pasukan Cina yang dipimpin oleh Kau Hsing. Jayakatwang berhasil dilumpuhkan dalam sekejap dan barulah pasukan Wijaya menyerang pasukan Cina yang sudah menganggap Wijaya teman. Lihat *Ibid*, hlm., 420-425.

²¹Menurut Negarakertagama, ada sebuah daerah di wilayah Malang yang dijadikan tempat bersemayamnya seorang putri raja bernama Kusumawardhani. Daerah ini bernama Kabalon, nama kabalon atau kabalan juga ditemukan dalam prasasti Waringin pitu. Prasasti ini berisi tentang wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit, termasuk didalamnya Kabalan, Daha, Kahuripan dan lain-lain. Lihat Suwardono dan Supiyati Rosmiayah, *op. cit.*, hlm.15-16.

Agung.²² Tahun 1722 VOC menyerbu Malang, dan akibat dari perjanjian Gianti tahun 1755 antara VOC dengan para bangsawan Mataram untuk menguasai wilayah timur Jawa mengakibatkan Malang jatuh ke tangan VOC tahun 1767.²³ Sesaat setelah VOC mengibarkan bendera kebangsaannya di kota Malang, dan menguasai seluruh aset kota maka berbagai perubahan mulai terasa. Suasana kota kolonial mulai tumbuh tatkala sebuah benteng, simbol pertahanan dibangun bagi kalangan intern. Berbagai fasilitas pun berdiri disekitar lingkungan ini, rumah sakit lengkap dengan dokter dan peralatan penunjang, makam bagi masyarakat Eropa, dan sebagainya.²⁴

Kebangkrutan VOC akibat manajemen yang tidak baik dan adanya perongrongan dari tubuh anggota sendiri mengakibatkan perkumpulan dagang ini mundur dari nusantara dan kedudukannya digantikan oleh pemerintah Belanda. Tahun 1812, Malang masih menjadi bagian residensi Pasuruan dengan seorang bupati bernama Raden Tumenggung Kartonegoro.²⁵ Kota ini merupakan wilayah pedalaman dan sangat bergantung pada Pasuruan yang letaknya lebih kearah pesisir atau berada di jalur Utara pantai Jawa. Salah satu ketergantungannya ada

²²Malang dan Lumajang berhasil ditaklukkan pada tahun 1614 M. Peranan Malang sebagai wilayah bawahan atau taklukan sangat penting, utamanya dari pasokan beras dan gabah yang dikelola oleh bupati di pesisir dan daerah pedalaman. *Ibid*, hlm., 8.

²³*loc. cit.*

²⁴ Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Empat Puluh Tahun Kota Malang* (Malang: Dewan Pemerintahan Daerah, 1954), hlm. 17.

²⁵ Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Lima Puluh Lima... op., cit.*, hlm., 16. Asisten residen Malang baru diangkat pada tahun 1824 yang bernama J.C. Hoffman. Asisten residen ini berkantor di dekat Alun-alun. Lihat A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm., 15.

pada sektor pendanaan berbagai kebutuhan dan perbaikan kota. Fungsi Malang kala itu nyaris hanya sebagai terminal pemberhentian bagi hasil-hasil pertanian atau perkebunan daerah sekitar.

1. *Gemeente* Malang

Peraturan pemerintah mengenai desentralisasi atau pemisahan kewenangan bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti pemisahan pengaturan kota yang sebelumnya langsung ditangani oleh pemerintahan pusat baru dilaksanakan pada tahun 1905.²⁶ Peraturan ini membawa dampak yang sangat besar utamanya bagi daerah-daerah yang secara otonomi memerintah wilayahnya. Keadaan ini kemudian memunculkan istilah kotamadya, daerah kota yang dipimpin oleh seorang walikota.

Kota Malang yang sejak tahun 1855 merupakan bagian dari karesidenan Pasuruan, baru pada tahun 1914 sebagai kelanjutan dari undang-undang desentralisasi berubah menjadi daerah kotamadya. Surat keputusan pemerintah mengenai pemisahan administrasi kota Malang terhadap Pasuruan tersebut tertuang dalam lembaran negara tahun 1914 nomor 297. Hal utama yang mendasari turunnya keputusan pemisahan administratif oleh Gubernur Jenderal di pusat kepada kota Malang lebih pada perkembangan kota yang semakin pesat, baik dari sektor ekonomi maupun sosial. Perkembangan ini memunculkan dan

²⁶Undang-undang desentralisasi dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1903 dan pada tahun 1905 Batavia sebagai kota yang berada dipusat pemerintahan untuk pertama kalinya menerapkan UU tersebut. Penerapan sistem desentralisasi pada kota-kota yang dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri tidak serempak dilakukan. Lihat Handinoto, *op. cit.*, hlm. 39. Malang menjadi *Gemeente* atau kotapraja baru pada tahun 1914 dengan kondisi struktur pemerintahan sangat sederhana.

membutuhkan pelembagaan tersendiri untuk mengakomodir setiap gagasan dan upaya-upaya perbaikan. Mundurnya perdagangan dari pelabuhan Pasuruan yang diakibatkan oleh semakin surutnya perdagangan gula dan kebijakan untuk memusatkan semua pendistribusian ekspor-impor atas hasil-hasil perkebunan ke luar negeri di pelabuhan Surabaya menjelang tahun 1900 membawa dampak sangat buruk bagi Pasuruan.²⁷ Kondisi ini membawa keuntungan bagi kota Malang yang kemudian merupakan daerah tujuan para migran dari wilayah tersebut. Malang mulai berbenah, jaringan telekomunikasi dan transportasi yang semakin baik sebagai bukti eksistensi kota Malang dan refleksi bagi pertumbuhan sektor ekonomi kota.

Pada saat ditetapkan menjadi *Gemeente* tanggal 1 April 1914, kota Malang belum memiliki seorang walikota sebagai pemimpin. Tampuk kepemimpinan di kota Malang diselenggarakan oleh dewan kota atau (*Raad Gemeente*). Dewan kota yang pertama dibentuk tanggal 1 April 1914, diketuai oleh Asisten Residen yang menjabat kala itu, yakni F.L. Broekveldt.²⁸ Masa tugas dewan kota yang pertama ini hanya sampai tahun 1918. Pada masa awal pemerintahan itu tugas kedinasan dilakukan dalam sebuah rumah sewaan di daerah Klojen Kidul yang terdiri dari

²⁷Handinoto, "Perkembangan Kota dan Arsitektur di Pasuruan dan Probolinggo Pada Jaman Kolonial", sebuah Laporan Penelitian tidak diterbitkan pada Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Kristen Petra, 2000, hlm. 30-31.

²⁸ Keputusan berpisahanya Malang secara administratif dari Pasuruan didasarkan pada *Staatsblad van Nederlandsch Indië* no. 297 tahun 1914. Sebelum ditetapkannya seorang walikota, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pemerintahan dilakukan oleh dewan kota yang beranggotakan 11 orang. Susunan anggota berasal dari 8 orang dari golongan Eropa, 2 dari Pribumi dan 1 dari Timur Asing. Lihat *Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, Lima puluh.... loc..cit.* dan *Bijlagen: Adviseur voor Decentralisatie* no. 227/A tanggal 28 Februari 1914 pasal 7 pada bagian 'Konsep Peraturan' pasal 7

dua kamar kerja sebagai kantor *Gemeente*. Rapat pertama dewan kota menetapkan antara lain sebuah komisi keuangan dan komisi teknik. Susunan kepegawaian pun masih sangat sederhana, hanya seorang sekretaris, bagian teknik (pelaksana lapangan), seorang administrasi dan beberapa mandor yang disebut sebagai pegawai lepas.²⁹ Tanggal 12 November 1918, hasil pemilihan dewan kota (*Raad Gemeente*) oleh warga menghasilkan: J.J. Coert (Asisten Residen) sebagai ketua, sedangkan susunan anggota berasal dari golongan Eropa 9 orang; 4 orang dari golongan pribumi; dan 2 orang dari golongan Timur Asing.³⁰ Tugas dewan kota saat itu adalah mengambil posisi dan melaksanakan kepemimpinan dalam wilayah kota Malang sampai terbentuk walikota. Semua kewajiban terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan semua pembiayaan telah menjadi tanggung jawab kotapraja Malang dengan pantauan dari karesidenan Pasuruan.³¹ Perubahan dari kebijakan pemerintahan ini sangat mempengaruhi perkembangan kota baik administratif maupun fisik dimana setiap keputusan yang diarahkan bagi perkembangan kota ditetapkan dalam *Gemeentebblad*.

²⁹ Agenda untuk rapat dewan kedua direncanakan pembentukan komisi perundang-undangan. Sampai akhir tahun 1914 telah ditetapkan tiga buah peraturan kota, yaitu: penarikan pajak tambahan 40 persen dari pegawai atau personeel; peraturan tentang tarif pekuburan dan yang terakhir penetapan pajak keramaian. Pada tahun 1915 dewan menetapkan peraturan mengenai pasar dan peraturan mengenai pajak anjingjuga pemasangan nomor dan papan nama bagi penginapan dan rumah-rumah Eropa. Peraturan tentang kesehatan dan tentang semua ketertiban umum ditetapkan antara tahun 1916-1917. Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Empat Puluh... op. cit*, hlm. 19.

³⁰ Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Lima puluh.... loc.,cit*. Warga Timur Asing disini bisa berarti orang-orang dari Cina atau Arab yang pada masa itu sudah banyak terlihat di kota Malang.

³¹ Misalnya, *Telegram Gouvernements Secretaris*, no. 312 tahun 1914, tertanggal 14 Maret 1914 yang ditujukan kepada ketua dewan wilayah Pasuruan. Telegram ini berisi pelimpahan kewajiban kontrak perusahaan listrik dan pelaksanaan pembukaan pasar yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh kota praja Malang dengan pinjaman yang telah diatur pada tahun 1913.

Ditinjau dari segi administratif, politik pemerintahan yang berlangsung setelah penetapan wilayah menjadi lebih mengedepankan kepentingan pemerintah dan masyarakat kota Malang. Ketentuan-ketentuan yang mulai diberlakukan bagi wilayah baru ini antara lain, penyerahan pengelolaan semua fasilitas yang terletak di wilayah kota Malang yang sejauh ini pengelolaannya dilaksanakan oleh wilayah Pasuruan. Setelah pelimpahan wewenang ini maka kota Malang berhak memungut setiap pajak dan bea cukainya sendiri, yang semula dilakukan oleh pemerintahan kota Pasuruan kepada masyarakatnya.³²

Walikota pertama ditunjuk pada tahun 1919 bernama H.I. Bussemaker yang penetapannya tercantum dalam *Staatsblad* (lembaran negara) no. 270 tahun 1919 dan keputusan pemerintah (*Gouvernementbesluit*) tanggal 12 Juni 1919.³³ Kota mulai berbenah, pembangunan jalan-jalan beraspal, pembangunan pemukiman, perbaikan-perbaikan kampung, saluran air dan sarana pemerintahan dengan dana yang telah dipersiapkan pemerintah total sebesar f 255.260 sebagai anggaran belanja kota setiap tahun.³⁴ Pada masa pemerintahan Bussemaker, Malang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun ini juga dewan rakyat menyetujui mulai diterbitkan warta kota dan laporan tahunan yang diatur

³²*Staatsblad van Nederlandsch Indië* no. 297 tahun 1914 dan *Bijlagen: Adviseur voor Decentralisatie* no. 2271A tanggal 28 Februari 1914

³³*Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 4.

³⁴ *Staatsblad van Nederlandsch Indië* no. 297 tahun 1914, pasal 2 dan 4. Rincian penggunaan dana awal *Gemeente* antara lain: penerangan jalan sebesar f 7.200; Kebersihan f 5.725; Rumah potong dan pemeriksaan daging f 1170; Pekuburan umum f 8.906,50; Pasar f 350; Kebakaran f 84,50 dan untuk pekerjaan umum lainnya sebanyak f 13.538, lihat Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Empat Puluhloc. cit.*

dalam keputusan dewan tanggal 26 Agustus 1919.³⁵ Berbagai upaya pembenahan dan perbaikan demi kelangsungan hidup di kota diusahakan hingga pada tahun 1929 atau pada akhir jabatan H.I. Bussemaker. Masa ini Malang yang semula berstatus sebagai *Gemeente* berubah menjadi *Stadsgemeente* yang memiliki kewenangan lebih besar.

2. *Stadsgemeente* Malang

Perubahan yang paling penting pada periode ini adalah dijadikannya kota Malang sebagai ibukota karesidenan Malang yang membawahi Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang.³⁶ Tampuk kepemimpinan pada tahun 1929 berada dibawah pimpinan Ir. E.A. Voorneman yang menjadi walikota kedua di kota Malang. Beliau mulai menempati kursi walikota Malang sejak Mei 1929. Dan pusat pemerintahan kota Malang yang dibangun sejak tahun 1927 mulai ditempati. Bangunan yang terdiri atas dua lantai ini dibangun dengan biaya f 299.962,29 resmi digunakan sejak tanggal 1 September 1929.³⁷ Perubahan status dari *Gemeente* menjadi *Stadsgemeente* per 1 Januari 1929 merupakan awal kehidupan baru bagi kota Malang seperti sekarang ini. Berbagai pembenahan secara administratif mulai diberlakukan, pembentukan komisi-komisi pelengkap

³⁵ *Ibid*, hlm. 20.

³⁶ A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm., 33.

³⁷ AJ. Purwanto, dkk. *Penelusuran Jejak-Jejak Sejarah Perjuangan Bangsa dan Aspek Pelestariannya di Kota Malang dan Sekitarnya* (Malang: LPM IKIP Malang, 1990), hlm. – Rincian biaya itu terdiri dari: biaya pembangunan sebesar f 287.337.29 dan biaya perabotan f 12.325.

struktur pemerintahan mulai dilakukan.³⁸ Pertumbuhan penduduk yang pesat, meningkatnya jumlah anggaran dan berbagai kebijakan mewarnai rangkaian peristiwa ini. Anggaran belanja kota Malang pada tahun 1929 yaitu sebesar f. 614.078.³⁹ Jumlah ini meningkat sebesar f. 194.096 dari perhitungan anggaran tahun 1924. Kenaikan anggaran belanja kota sebenarnya adalah sebuah rutinitas kenaikan anggaran yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada akhirnya kenaikan anggaran yang diterimakan kepada departemen keuangan tidak dapat dijadikan dasar yang menandai pergantian status kota dari *Gemeente* menjadi *Stadsgemeente*.

Peralihan status pemerintahan ini sebenarnya merupakan kebijakan yang merubah *Reggeringsreglement* tahun 1854, melalui keputusan pemerintah yang tertuang dalam lembaran negara tahun 1922. Keputusan itu merupakan sebuah ketetapan baru tentang suatu kota diwilayah Hindia Belanda dapat menjadi sebuah daerah otonom yang seluas-luasnya. Sepanjang keadaan daerah setempat memungkinkan, maka bagian-bagian wilayah dari suatu propinsi dapat pula

³⁸Perubahan dari *Gemeente* menjadi *Stadsgemeente* merupakan peralihan kewenangan yang lebih besar terhadap kota Malang. Ketika direalisasikan menjadi *gemeente* pada tahun 1914 oleh pemerintah pusat, struktur pemerintahan dalam kota masih sangat sederhana dan kewenangan kota terhadap urusan rumah tangganya sendiri masih terbatas. Berbeda ketika penetapan Malang sebagai *stadsgemeente*, struktur pemerintahan yang lebih baik dengan keluasan wewenang yang lebih besar. Kota ini kemudian bertanggungjawab langsung kepada propinsi. Sejak saat itu Malang menjadi ibukota karesidenan Malang membawahi Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Lihat Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur ...op. cit.*, hlm. 97.

³⁹Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Empat Puluhop. cit.*, hlm. 21. Kenaikan anggaran belanja kota Malang antara tahun 1914-1924 yaitu, Tahun 1914: f. 47.025; tahun 1919: f. 225.462; dan tahun 1924: f. 419.982. Besarnya anggaran yang tertera diatas belum termasuk jumlah anggaran dari masing-masing dinas yang menangani perusahaan tertentu.

ditunjuk sebagai daerah yang berdiri sendiri dan bertanggungjawab langsung kepada propinsi.⁴⁰

Mengawali masa kecpemimpinannya, Ir. Voorneman melakukan rapat koordinasi bersama anggota dewan sekaligus mengadakan pemilihan anggota dewan yang baru. Berdasarkan hasil pemilihan itu maka ditetapkan penambahan anggota dewan dari golongan pribumi sebanyak 2 orang sehingga menghasilkan 6 orang anggota pribumi, 9 orang Eropa dan dari Timur asing tetap dengan 2 orang.⁴¹ Pengaturan lebih lanjut mengenai tata pemerintahan, tugas dan wewenang, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari propinsi atau bagian-bagian lainnya ditetapkan dalam ordonansi tersendiri.⁴² Pengawasan pekerjaan-pekerjaan keuangan dan harta benda yang masih bersifat hukum dari dewan kota dan juga terhadap peraturan-peraturan di lakukan oleh *College van Gedeputeerden* atau Badan Wakil Rakyat dari *Provinciale Raad*.⁴³ Pembentukan *Wethouderschap* atau Dewan Pemerintahan Daerah di kota Malang disahkan pada awal tahun 1931 yang beranggotakan dua orang, yaitu R. Soekardjo Wirjopranoto dan Mr. G.L. Kelder.⁴⁴ Dengan adanya dewan pemerintahan Daerah, maka

⁴⁰Mona Lohanda, *Sejarah Sosial di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 14-15. Perubahan status ini diatur dalam *Staatsblad* no. 216 tahun 1922. Ketentuan itu memuat tentang satuan-satuan wilayah dalam sebuah provinsi, lengkap dengan dewan provinsi dan pembagian daerah yang berdiri sendiri. Setelah peristiwa ini, di Jawa kemudian terbentuk tiga buah provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lihat Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur...loc. cit.*, hlm. 97.

⁴¹*Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 4

⁴²Mona Lohanda, *loc. cit.*

⁴³Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Empat Puluh, loc. cit.*

⁴⁴Tahun pembentukan *Wethouderschap* dalam beberapa sumber saling silang pendapat. *Stadsgemeente Malang 1938*, hlm.8, menuliskan angka tahun 1931 pengesahan sebuah badan

susunan komisi-komisi dalam dewan kota dihapuskan. Namun penyerahan kekuasaan pemerintahan dari dewan kota kepada dewan pemerintahan daerah atau *Wethouders* itu tidak berjalan dengan lancar. Kekuasaan ini baru terwujud setelah tahun 1938, dimana walikota Ir. A.E. Voormeman diganti oleh Lakeman. Pada akhir tahun itu keanggotaan *Wethouders* yang semula berjumlah tiga orang, bertambah menjadi empat orang.⁴⁵ Kekuasaan badan atau dewan ini menjadi lebih besar ketika kemudian keputusan dihapuskannya dewan kota. Dewan kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebelum seorang walikota khususnya untuk wilayah kota Malang ditunjuk. Ketika seorang walikota menduduki pemerintahan, dewan ini masih menyertai dalam setiap pengambilan keputusan. Bersama dengan walikota, *Wethouders* atau dewan pemerintahan daerah bertanggungjawab atas segala masalah pertanahan, dan semua yang berkaitan dengan peraturan kota.

Mengenai bidang-bidang atau komisi yang menyertai kerja dewan pemerintahan daerah dan walikota ada 16 komisi yang sudah diperbarui tanggal 31 Desember 1938. Delapan kelompok menempati pos komisi yang

yang bernama *Wethouderschap* berdasarkan *Raadbesluit van 17 November 1930* (no. 7010/18). Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Empat Puluh...*, *op. cit.*, hlm. 21, disebutkan bahwa tahun 1922 terjadi persetujuan terhadap pembentukan *Wethouderschap*, tahun 1929 kasus ini kembali digugat dan pada tahun 1930 badan ini ditetapkan kembali. Terakhir berasal dari Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Lima Puluh...*, *op. cit.*, hlm.17, Dewan Pemerintahan Daerah atau *Wethouderschap* dibentuk pada tahun 1930.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 22 Segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan lembaga *Wethouders* diwilayah Hindia Belanda diatur dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indië* no. 327 tahun 1922. Dalam lembaran negara ini menyebutkan rangkaian permasalahan yang ditangani oleh *Wethouders* bersama walikota dan segala sesuatu yang mengatur keberadaan kelembagaan ini termasuk masa jabatan dan keanggotaan. Lihat *Staatsblad van Nederlandsch Indië* no. 327 Tahun 1922

diperbantukan, antara lain 2 komisi menangani masalah pendidikan kejuruan dan perpustakaan; komisi untuk pekerjaan umum, komisi untuk masalah pemakaman, komisi urusan pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan dan yang terakhir menangani masalah pemilihan umum. Enam komisi menempati pos sebagai komisi penasehat, dan dua lainnya berada dikomisi khusus yang menangani masalah misi sekolah Belanda dan pengadaan air minum atau air bersih bagi warga.⁴⁶

Para anggota dewan ini mendapatkan tunjangan sebesar *f* 75⁴⁷ sebulan. Nilai ini adalah nilai tunjangan atau tambahan yang diberikan setiap bulan atas kehadiran mereka dalam sidang yang diselenggarakan setiap sekurang-kurangnya tiga kali sebulan. Biasanya mereka menyertakan paraf pada setiap kehadiran dalam buku hadir di ruang sidang.

B. Keadaan Penduduk

Penduduk kota Malang sejak pendudukan VOC adalah sebuah komunitas yang majemuk. Kemajemukan ini tidak saja terbentuk dari dominasi suku-suku pribumi saja melainkan lebih universal dari berbagai etnis suku bangsa. Fenomena ini tidak lepas dari awal terbentuknya kota Malang dengan wilayah kota pelabuhan di sebelah Utaranya. Keterkaitan tersebut mendukung persebaran penduduk ke wilayah-wilayah ekonomis disekitarnya termasuk Malang.

⁴⁶*Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.*, hlm. 9-10.

⁴⁷Nilai mata uang Gulden (*f*) per *f*1 jika ditukarkan dengan beras, mendapatkan takaran 8,5 Kg tahun 1870, lihat Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1991), hlm. 100. Belum diketahui berapa nilai tukar pada tahun penulisan (1914) yang pasti nilai tersebut tidak stabil, selalu berubah-ubah mengikuti persediaan beras pada saat itu.

Tabel. 1

Pertumbuhan Penduduk

	Eropa	Timur Asing	Pribumi	Total
1890	459	1768	9813	12040
1905	1353	3957	24274	29584
1920	3504	4683	35165	43352
1925	5344	6501	52518	64363
1930	7463	8521	70662	86646
1935	10672	8817	74309	93798
1938	11529	9120	75737	96386
1940	13867	13163	142286	169316

Sumber: *Stadsgemeente Malang 1914-1939* dan *Malang Beeld van Een Stads*

Berdasarkan data mengenai jumlah penduduk yang mendiami kota Malang pada tahun 1905 diketahui sebanyak 29.541 jiwa, terdiri dari 24.274 pribumi, 3.914 Timur Asing dan penduduk berkebangsaan Eropa sebanyak 1.353 jiwa. Penduduk yang menempati wilayah kota Malang berasal dari berbagai wilayah di sekitarnya, termasuk beberapa suku Tengger, Kediri bahkan Madura.⁴⁸ Kota Malang merupakan sebuah wilayah dataran tinggi yang sangat disukai warga asing sebagai tempat bermukim. Oleh sebab itu pemusatan penduduk di wilayah-wilayah dataran tinggi pada masa pemerintahan Belanda adalah sebuah fenomena umum yang kerap kali terlihat di semua dataran tinggi Hindia Belanda. Tentunya

⁴⁸ Hans Gooszen, *A Demographic History of The Indonesian Archipelago 1880-1942* (Leiden: KITLV Press, 1999), hlm. 63, 73. Angka-angka yang terdapat dalam tabel dikutip dari A. van Schaik, *op. cit.*, dan *Stadsgemeente Malang 1938, op. cit.* Perbedaan-perbedaan angka dalam data statistik banyak terjadi pada setiap literatur khususnya mengenai Malang.

pemusatan penduduk tidak hanya terjadi di wilayah itu saja, karena angka konsentrasi penduduk juga didapat di wilayah pusat pemerintahan.⁴⁹

Pertumbuhan penduduk kota tidak saja mencerminkan penambahan alami penduduk, tetapi juga faktor pertumbuhan arus penduduk desa yang makin besar untuk mencari pekerjaan di kota.⁵⁰ Faktor internal yang menunjang bertambahnya arus peledakan penduduk kota Malang selain dominasi sistem pemerintahan kolonial terhadap penetapan peraturan-peraturan di Jawa, peledakan penduduk juga terjadi karena faktor urbanisasi dan berkembangnya fungsi kota Malang sebagai daerah pusat lalu lintas perdagangan.⁵¹ Malang berkembang menjadi sebuah kota dengan berbagai fasilitas pendukung yang mudah dijangkau. Kebijakan demi kebijakan bagi perkembangan kota dan kesejahteraan penduduk mulai ditetapkan sejak terbentuknya dewan kota. Sejak tahun 1920 pembangunan yang pesat di kota Malang menghasilkan satu titik tolak terhadap masalah-masalah kependudukan dan pemukiman.⁵²

⁴⁹ H.W. Dick, *Surabaya City Of Work: A Socioeconomic History 1900-2000* (Athens: Ohio University Press, 2002), hlm. 125.

⁵⁰ Pertambahan ini dikarenakan faktor pendorong dan faktor penarik dari kondisi kota itu sendiri. Konsekuensi dari adanya hubungan yang erat antara pertumbuhan penduduk dan lingkungan perkotaan dan sudah banyak mendapat perhatian, salah satu misal adalah adanya pemusatan daerah industri. Pemusatan industri di kota Malang sudah mulai tampak sejak rencana pembangunan (*bonwplan*) keempat sekitar tahun 1930-an. Lihat Philip M. Hauser, ed. all., *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan: Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Asia, 1985), hlm. 3-4.

⁵¹ A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm. 29.

⁵² Suwardono dan Supriyati Rosmiayah, *op. cit.*, hlm. 20.

Pertambahan penduduk wilayah perkotaan erat kaitannya dengan perkembangan kota secara fisik. Faktor utama yang patut dicermati adalah meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia sebagai dampak dari berkembangnya ekonomi perkotaan. Meningkatnya perdagangan, meluasnya industri, adalah aset yang ditawarkan 'kota' untuk berbagai kesempatan kerja.⁵³ Salah satu wilayah di Jawa Timur yang menjadi tujuan arus perpindahan penduduk adalah kota Malang. Perluasan tanah perkebunan dan meningkatnya hasil-hasil pertanian diwilayah-wilayah sekitarnya menjadikan Malang sebagai pusat kantong-kantong urbanisasi. Pada saat itu karesidenan Malang memiliki luas wilayah mencapai 10.000 – 13.700 km², begitu juga dengan Besuki. Dua wilayah ini merupakan wilayah yang paling besar di Jawa Timur dan menyerap banyak migran dari luar wilayah bahkan terhadap Surabaya sekalipun.⁵⁴ Daerah-daerah yang memiliki wilayah luas mengakibatkan perhitungan jumlah penduduk menjadi kurang signifikan. Lain halnya dengan daerah kecil seperti Surabaya dan Yogyakarta. Perpindahan dan pergerakan penduduk dalam sebuah wilayah menjadi sangat jelas terlihat. Hal ini dimungkinkan karena semakin luas wilayah maka semakin longgar tingkat pengawasan terhadap lalu lintas penduduk dan

⁵³ *Ibid.* hlm., 145-146.

⁵⁴ Surabaya hanya mempunyai wilayah sebesar 3.200 – 3.500 km² bagi para pendatang. Ukuran wilayah diatas, ada kemungkinan merupakan luas wilayah di karesidenan, baik Malang, maupun Besuki (Besuki adalah satu kota dari Karesidenan Besuki). Hans Gooszen, *op. cit.*, hlm. 67-68. Sedangkan luas wilayah yang tercantum untuk Surabaya adalah luas wilayah yang menjadi tujuan arus migran dari luar daerah.

akan terlihat semakin kecil jumlah penduduk yang mendiami tempat tersebut, sehingga selisih angka pada tiap perhitungan penduduk berdasarkan skala luas wilayah sering terjadi sebelum tahun 1930.⁵⁵ Luas wilayah kota Malang tahun 1934 mengalami perkembangan sebesar 379 Ha dari luas semula yaitu 1503 pada tahun 1914. Pertambahan luas ini dipengaruhi juga dengan pertumbuhan penduduk didalam kota.⁵⁶

Berawal dari pemenuhan kebutuhan hidup maka seseorang harus berpindah ke suatu tempat yang lebih jauh dari pemukiman aslinya. Penduduk semacam ini di tempatnya yang baru bisa disebut dengan penduduk musiman. Mereka mendominasi wilayah-wilayah disekitar industri, pelabuhan, perkebunan dan wilayah proyek-proyek pembangunan. Pemusatan industri di kawasan Malang diletakkan di sebelah Selatan, ketentuan mengenai pendirian bangunan telah diperhitungkan, kemudian lahan seluas 560 Ha di wilayah tersebut mulai diusahakan penyediaannya.⁵⁷ Kebutuhan lahan-lahan itu sekiranya dimanfaatkan untuk pembangunan sektor ekonomi, sarana pendidikan dan kesehatan kota yang memiliki peranan penting bagi penduduk. Pemenuhan terhadap fasilitas-fasilitas hidup masyarakat perlahan-lahan dibenahi dan diusahakan pembangunannya

⁵⁵ Daerah yang memiliki angka perpindahan penduduk tertinggi di pulau Jawa berasal dari wilayah selatan Jawa Tengah termasuk Yogyakarta, Kedu dan Surakarta. Mereka menuju kantong-kantong pemukiman yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. *Ibid.*

⁵⁶ Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Empat Puluh...*, *op. cit.*, hlm. 78 dan *Stadsgemeente Malang 1938*, *op. cit.*, hlm. 1

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 76.

sehingga Malang pada periode tersebut telah menjadi pusat kota bagi kota-kota di sekitarnya. Sebuah data menyebutkan bahwa banyak penduduk usia sekolah dari luar kota yang memilih migrasi ke Malang untuk mendapatkan pendidikan lebih baik.⁵⁸ Akhir tahun 1939 perhitungan komposisi penduduk di wilayah Malang menjadi 11% dari Eropa, 10% etnis China dan 78% dari Pribumi dengan total jumlah penduduk 169.316 jiwa.⁵⁹

⁵⁸ANRI, *Memori Serah Jabatan 1921-1930: Jawa Timur dan Tanah Kerajaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), hlm.CXXX

⁵⁹ A. Van Schaik, *op. cit.*, hlm. 35

BAB III

PEMEKARAN KOTA MALANG